Journal of Macroeconomics and Social Development, Volume 1, Number 4, 2024, *Page*: 1-9

Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-ekonomi Antar Masyarakat

Muhammad Putra Hababil*, Muhammad Kharis Firdaus, Nabil Nazhmi, Mochamad Rajendra Alghifary, Mohammad Dandi Hamdani, Arif Fadilla

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia

*Correspondence: Muhammad Putra Hababil
Email: 2310631020193@student.unsika.ac.id

Received: 29 Apr 2024
Accepted: 03 Jun 2024
Published: 03 Jun 2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak: Ketimpangan sosial-ekonomi merujuk pada disparitas yang signifikan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review, penelitian ini menelaah berbagai studi dan laporan untuk memahami bagaimana kebijakan pemerataan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan. Pemerataan ekonomi berfokus pada distribusi pendapatan yang adil, akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Indikator seperti koefisien Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan publik digunakan untuk mengukur dampak dari kebijakan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Implementasi kebijakan redistribusi pendapatan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar terbukti efektif dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerataan ekonomi merupakan alat yang vital dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan merekomendasikan kebijakan yang lebih agresif dan terarah untuk mencapai tujuan ini. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kata kunci: Pemerataan Ekonomi; Ketimpangan Sosial-Ekonomi; Pertumbuhan Ekonomi

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan yang melanda sebagian besar rakyatnya (Sutikno, 2020). Meskipun ekonomi Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan pendapatan tetap menjadi masalah serius. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, dengan sekitar 9,8 persen dari total populasi hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2023. Faktor-faktor seperti akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, serta peluang kerja yang layak, memperparah

kondisi ini. Kemiskinan tersebar secara tidak merata, dengan angka yang lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan, menunjukkan adanya disparitas regional yang signifikan (Sianturi, Syafii, & Tanjung, 2021). Ketidakmerataan ekonomi menggambarkan bahwa kesejahteraan tidak tersebar secara merata akibat dari pembangunan yang telah dilakukan. Jika tidak ditangani, ketidaksetaraan ekonomi dapat memunculkan berbagai masalah, termasuk gangguan pada stabilitas keamanan

Selain itu, struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada sektor informal dan pertanian dengan produktivitas rendah juga menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan. Sementara itu, lapisan masyarakat menengah ke atas menikmati keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, akses terhadap sumber daya yang lebih baik, dan kesempatan yang lebih luas dalam sektor-sektor modern dan formal (Wiguna & Panennungi, 2019). Ketimpangan ini mencerminkan adanya kesenjangan besar antara kaya dan miskin, yang jika tidak segera ditangani, dapat memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai program bantuan sosial dan kebijakan redistribusi, namun tantangan besar tetap ada dalam memastikan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan sosial-ekonomi merujuk pada disparitas yang signifikan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar (Rohmah & Sastiono, 2021). Misalnya, sebagian masyarakat mungkin memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, sementara yang lain terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Ketimpangan ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam kekayaan, status sosial, kebijakan pemerintah, serta diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau latar belakang etnis. Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kohesi sosial, karena masyarakat yang merasa terpinggirkan cenderung kurang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Hendajany & Rizal, 2020).

Dampak ketimpangan sosial-ekonomi sangat luas dan dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi sering kali terkait dengan meningkatnya tingkat kriminalitas, ketidakstabilan politik, dan ketidakpuasan sosial (Sastiono & Nuryakin, 2019). Selain itu, ketimpangan dapat menghalangi mobilitas sosial, dimana individu dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan status ekonominya. Ini menciptakan siklus kemiskinan antar generasi yang sulit diputus. Pemerintah dan organisasi internasional seringkali berupaya mengurangi ketimpangan melalui kebijakan redistributif, seperti program bantuan sosial, pendidikan yang inklusif, dan layanan kesehatan yang merata (Dwiningwarni, 2020).

Ketimpangan sosial-ekonomi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan

pendapatan. Di Indonesia, kesenjangan antara kaya dan miskin masih sangat nyata, dengan sebagian besar kekayaan negara terkonsentrasi pada segelintir populasi (Wardoyo, 2024). Kondisi ini tidak hanya menciptakan disparitas yang mencolok antar kelompok masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial seperti meningkatnya tingkat kriminalitas, rendahnya kualitas hidup, dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan ini menjadi sangat krusial demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Pemerataan ekonomi merupakan salah satu strategi utama yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi tersebut. Pemerataan ekonomi tidak hanya tentang redistribusi pendapatan atau kekayaan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi (Kharisma, Remi, Wardhana, & Minarso, 2020). Hal ini melibatkan berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta menyediakan layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang memadai. Dengan demikian, pemerataan ekonomi berfungsi sebagai alat penting untuk menciptakan kondisi di mana semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan ekonomi yang terencana, terarah, dan efektif adalah konsep pembangunan yang dinamis. Ini tidak hanya tentang meningkatnya ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan kesetaraan dalam skala lokal, sektoral, dan individu. (Badriah, 2020) (Sayekti, 2017) (Gamal Abdul Aziz, 2016) (Abdul Rajab, 2021) (Hesty Aisyah, 2023)Selain itu, pemerataan ekonomi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketimpangan yang ekstrem dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial yang berpotensi mengarah pada konflik (Hutajulu, Panjawa, Islami, & Sugiharti, 2020). Pemerataan ekonomi membantu mengurangi ketegangan ini dengan memastikan bahwa keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang (Hutajulu, Jihad, Islami, & Retno, 2020). Dengan demikian, masyarakat yang lebih merata secara ekonomi cenderung lebih stabil dan harmonis, yang pada akhirnya mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai pemerataan ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah dan strategi pembangunan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review untuk menganalisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks melalui analisis mendetail dari berbagai sumber literatur. Pendekatan literature review memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya, yang berkaitan dengan topik pemerataan ekonomi dan ketimpangan sosial-ekonomi. Dengan menelaah berbagai perspektif dan hasil penelitian, peneliti dapat

memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pemerataan ekonomi telah diterapkan dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di berbagai konteks.

Proses literature review dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber akademis seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan. Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria relevansi, kredibilitas, dan kontribusi terhadap pemahaman topik yang diteliti. Analisis data dilakukan secara tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang ditinjau, seperti kebijakan pemerataan ekonomi, strategi implementasi, dan hasil empiris dari penerapan kebijakan tersebut. Temuan-temuan dari analisis ini kemudian dibandingkan dan diintegrasikan untuk memberikan insight yang lebih luas mengenai pengaruh pemerataan ekonomi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam upaya ini.

Hasil dan Pembahasan

Ketimpangan sosial-ekonomi merujuk pada distribusi yang tidak merata dari sumber daya, kekayaan, dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ketimpangan ini dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kondisi perumahan. Ketimpangan sosial-ekonomi sering kali disebabkan oleh berbagai faktor struktural seperti kebijakan ekonomi, sistem pendidikan yang tidak merata, diskriminasi, dan mobilitas sosial yang terbatas. Akibatnya, sebagian kecil populasi mungkin menguasai sebagian besar kekayaan dan sumber daya, sementara sebagian besar lainnya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Konsep dasar ketimpangan sosial-ekonomi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana perbedaan ini mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok. Ketimpangan yang tinggi dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi, menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial, kriminalitas, dan masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, ketimpangan yang signifikan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi partisipasi dan kontribusi dari sebagian besar populasi yang tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Ketimpangan sosial-ekonomi adalah fenomena kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah pendidikan. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas menciptakan perbedaan besar dalam keterampilan dan pengetahuan antara individu. Mereka yang memiliki akses lebih baik cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi dan peluang karier yang lebih baik, sementara mereka yang kurang beruntung sering kali terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah atau menganggur. Selain itu, kualitas pendidikan yang berbeda di berbagai daerah juga memperparah ketimpangan ini, dengan daerah pedesaan atau tertinggal sering kali menerima pendidikan yang jauh di bawah standar.

Akses terhadap pekerjaan dan upah juga menjadi faktor penting dalam ketimpangan sosial-ekonomi. Pasar tenaga kerja yang tidak adil, di mana terdapat diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau latar belakang sosial, memperburuk ketimpangan. Pekerja dari kelompok minoritas atau dengan latar belakang ekonomi rendah sering kali menerima upah yang lebih rendah untuk pekerjaan yang sama atau tidak memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, globalisasi dan teknologi juga telah menciptakan jurang yang lebih lebar antara pekerja terampil dan tidak terampil, dengan yang pertama mendapatkan manfaat lebih besar dari pertumbuhan ekonomi global.

Kesehatan juga memainkan peran penting dalam ketimpangan sosial-ekonomi. Akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas membuat kelompok berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap penyakit dan kondisi kesehatan yang buruk, yang pada gilirannya membatasi kemampuan mereka untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan yang layak. Biaya kesehatan yang tinggi dan keterbatasan dalam asuransi kesehatan memperburuk situasi ini, membuat orang miskin semakin terjebak dalam siklus kemiskinan.

Selain itu, struktur sosial dan kebijakan pemerintah juga berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan sosial-ekonomi. Sistem pajak yang regresif, di mana beban pajak lebih besar ditanggung oleh kelompok berpenghasilan rendah, serta kebijakan yang tidak mendukung redistribusi pendapatan, memperparah ketimpangan ini. Kebijakan yang tidak efektif dalam memberikan bantuan sosial atau yang tidak mendukung pengembangan daerah tertinggal juga memperburuk ketimpangan. Korupsi dan ketidakstabilan politik sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan yang seharusnya bisa mengurangi ketimpangan, menyebabkan sumber daya tidak didistribusikan dengan adil dan hanya menguntungkan segelintir elit.

Teori pemerataan ekonomi berfokus pada upaya untuk mendistribusikan sumber daya dan pendapatan secara lebih adil di seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Dasar dari teori ini adalah keyakinan bahwa ketimpangan yang ekstrem dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan berbagai masalah sosial. Pemerataan ekonomi berusaha memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keseluruhan masyarakat.

Salah satu pendekatan dalam teori pemerataan ekonomi adalah teori redistribusi pendapatan. Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan melalui pajak dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk layanan publik dan program sosial. Pendapatan dari pajak progresif, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar, digunakan untuk mendanai program-program seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan tunjangan sosial. Redistribusi ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan memberikan peluang yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Selain redistribusi pendapatan, teori pemerataan ekonomi juga mencakup konsep keadilan sosial. Keadilan sosial mengacu pada distribusi yang adil dari sumber daya dan

peluang dalam masyarakat, di mana setiap individu mendapat perlakuan yang setara dan memiliki hak yang sama. Ini termasuk akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan. Teori ini berargumen bahwa keadilan sosial tidak hanya penting dari perspektif moral, tetapi juga esensial untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan produktif. Ketidakadilan yang dibiarkan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial yang merugikan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Teori pemerataan ekonomi juga mengakui pentingnya investasi dalam modal manusia sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan. Investasi ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas individu dan, pada gilirannya, pendapatan mereka. Pendidikan yang berkualitas dan akses yang luas ke pelatihan vokasional dapat membantu individu dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan yang mempromosikan investasi dalam pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai elemen kunci dari strategi pemerataan ekonomi.

Salah satu indikator utama yang menunjukkan pengaruh pemerataan ekonomi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi adalah koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi yang sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan maksimal (satu orang memiliki semua pendapatan). Penurunan koefisien Gini setelah penerapan kebijakan pemerataan ekonomi menunjukkan bahwa distribusi pendapatan menjadi lebih merata, yang berarti kebijakan tersebut berhasil mengurangi ketimpangan.

Selain koefisien Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan indikator penting untuk mengukur pengaruh pemerataan ekonomi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi. IPM menggabungkan indikator dari tiga dimensi utama: harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Perbaikan dalam IPM, terutama dalam kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang beruntung, menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi telah memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Peningkatan IPM mencerminkan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan dan pengurangan ketimpangan antar kelompok masyarakat.

Tingkat kemiskinan juga merupakan indikator yang signifikan dalam mengukur efektivitas pemerataan ekonomi. Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Pemerataan ekonomi yang efektif akan mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan memberikan mereka akses ke peluang ekonomi yang lebih baik, bantuan sosial, dan pendidikan. Penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi berhasil mengangkat sebagian besar populasi keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga merupakan indikator penting yang menunjukkan pengaruh pemerataan ekonomi. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

serta layanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerataan ekonomi. Misalnya, peningkatan jumlah anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, serta peningkatan akses ke perawatan kesehatan dasar, menunjukkan bahwa manfaat dari pemerataan ekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat. Indikator ini penting karena pendidikan dan kesehatan adalah faktor kunci yang menentukan mobilitas sosial dan ekonomi jangka panjang, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

Pemerataan ekonomi memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat dengan memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil. Salah satu pengaruh utama pemerataan ekonomi adalah peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan pemerataan pendidikan, anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, yang pada gilirannya meningkatkan prospek pekerjaan dan pendapatan mereka di masa depan. Akses yang lebih merata terhadap layanan kesehatan juga membantu mengurangi beban penyakit dan meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan, yang berkontribusi pada pengurangan ketimpangan dalam jangka panjang.

Selain itu, pemerataan ekonomi melalui kebijakan redistribusi pendapatan, seperti pajak progresif dan transfer tunai, dapat langsung mengurangi ketimpangan pendapatan. Kebijakan-kebijakan ini memastikan bahwa pendapatan dari individu atau kelompok yang lebih mampu disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk program sosial, subsidi, dan layanan publik. Contoh dari kebijakan ini termasuk bantuan tunai langsung, program kesejahteraan sosial, dan subsidi kebutuhan dasar seperti pangan dan energi. Dengan cara ini, pemerataan ekonomi tidak hanya meningkatkan daya beli kelompok masyarakat yang kurang mampu tetapi juga membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pemerataan ekonomi mendorong stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih besar. Ketimpangan yang tinggi sering kali menimbulkan ketidakpuasan sosial, meningkatkan risiko konflik, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan mengurangi ketimpangan, masyarakat menjadi lebih stabil dan kooperatif, yang mendukung lingkungan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan. Ada empat strategi dalam membangun ekonomi masyarakat yaitu peningkatan dalam kualitas dan kuantitas perhatian yang diberikan oleh lembaga sosial, masyarakat, dan pemangku kepentingan, peningkatan dalam upaya pengurangan risiko bencana secara menyeluruh dan efisien; peningkatan dalam kualitas penegakan hukum yang adil, dan p (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2021)eningkatan dalam kesempatan kerja dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah masyarakat. Selain itu, ketika lebih banyak orang memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, basis konsumen yang lebih luas tercipta, yang pada gilirannya mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerataan ekonomi tidak hanya berkontribusi pada keadilan sosial tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa pemerataan ekonomi merupakan alat yang sangat efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. Melalui berbagai kebijakan redistribusi pendapatan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta investasi dalam modal manusia, pemerataan ekonomi mampu menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualtas hidup mereka. Indikator-indikator seperti koefisien Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan dasar menunjukkan bahwa upaya pemerataan ekonomi yang diterapkan secara efektif dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.

Pemerataan ekonomi tidak hanya berdampak pada peningkatan keadilan sosial tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dengan mengurangi ketimpangan, masyarakat menjadi lebih harmonis dan stabil, yang mendukung lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerataan ekonomi memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang, sehingga menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerataan ekonomi harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah dan strategi pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Daftar Pustaka

Abdul Rajab, J. K. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah dan tingkat kemiskinan. *Jurnal FEB UNMUL*, 607-609.

Badriah, L. S. (2020). KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KAITANNYADENGANPERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN SERTAFAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Unsoed*, 232.

Dwiningwarni, S. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 4(1)*, 1-20.

Edwin Aulia Rahman, S. H. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA SURABAYA UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAERAH (Studi pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat). *Jurnal Kajian Akademisi dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan*, 2-3.

Florensia K. Lamanele, D. S. (2024). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA BARAT. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , 25-30.

Gamal Abdul Aziz, E. R. (2016). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 29-31.

Hendajany, N., & Rizal, D. (2020). Ketimpangan Penghasilan Berdasarkan Status Pekerjaan dalam Model Imbal Jasa Pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 20(2)*, 133-145.

Hesty Aisyah, M. D. (2023). PENGARUH HUBUNGAN ANTARA KETIMPANGAN. *Jurnal Economina*, 3722-3723.

Hutajulu, D., Jihad, L., Islami, F., & Retno, R. S. (2020). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Induk dan Pemekaran di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 23(2)*, 263-284.

Hutajulu, D., Panjawa, J., Islami, F., & Sugiharti, R. (2020). Determinan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan wilayah induk dan pemekaran di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 23(2)*, 263-284.

Istiqamah, S. S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 111-113.

Kharisma, B., Remi, S., Wardhana, A., & Minarso, D. (2020). Modal Sosial dan Kemiskinan di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 23(2)*, 317-338.

M. Zidny Nafi' Hasbi, F. S. (2021). IMPLEMENTASI ANALITYCAL NETWORKING PROCESS (ANP) DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT BERKELANJUTAN (STUDY KASUS LEMBAGA BAZNAS KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR). *JURNAL TABARRU' : ISLAMIC BANGKING AND FINANCE* , 2-3.

Rohmah, Z., & Sastiono, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Peningkatan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Upah (Studi Kasus Provinsi-Provinsi di Jawa). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 21(2)*, 235-256.

Sastiono, P., & Nuryakin, C. (2019). Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 19(2)*, 242-262.

Sayekti, N. W. (2017). KETIMPANGAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN. *Jurnal Budget*, 1-4.

Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika, 5(2)*, 125-133.

Sutikno, A. N. (2020). Bonus Demografi di Indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 12(2)*, 421-439.

Wardoyo, Y. A. (2024). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Sistem Ekonomi Terbuka Periode 2011-2020. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan, 12(1)*, 165-186.

Wiguna, A. T., & Panennungi, M. A. (2019). Dampak Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 19(1)*, 49-61.